



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 14
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 1 Februari 2017
Waktu	: Pukul 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat	: Dr. H. Deding Ishak, SH., MM.
Sekretaris Rapat	: Yanto Supriyanto, S.H
Acara	: Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual
Hadir	: orang dari 47 orang Anggota Komisi VII DPR RI

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat pada pukul 14.00 WIB, yang dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Deding Ishak, SH., MM. pada waktu dan tempat tersebut diatas.

3. Rapat Dengar Pendapat dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, serta tanggapan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-Isu Aktual Pendidikan Islam**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI **dapat menerima** laporan pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2016 dengan realisasi sebesar 95,04% atau sebesar Rp41.939.098.528.654,- (*empat puluh satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah*) dari total pagu sebesar Rp44.128.150.626.000,- (*empat puluh empat triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah*), dengan catatan:
 - a. Memperbaiki kualitas perencanaan anggaran, khususnya pada unit kerja Direktorat Pendidikan Agama Islam, karena terdapat sisa anggaran sebesar Rp46.126.779.001, (*empat puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu satu rupiah*) pada program Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Non-PNS sementara di sisi lain terdapat kekurangan anggaran pada program tersebut.
 - b. Melakukan evaluasi kinerja pada unit kerja yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah, yaitu pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren (serapan anggaran 76.60%) dan Direktorat Pendidikan Agama Islam (serapan anggaran 85.24%).
 - c. Menjadikan hasil evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2016 sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran pada tahun 2017.

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk mengupayakan kebijakan pengalihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PAI yang berstatus PNS dan Non-PNS ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Melengkapi data-data yang terkait dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari pinjaman ke Komisi VIII DPR RI, terutama dana yang bersumber dari SBSN, sebagai bahan pengawasan.
 - b. Meningkatkan kemitraan dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam pengawasan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah.
 - c. Melakukan langkah dan upaya konkret dalam revitalisasi Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK)
 - d. Meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI dan Pemerintah Daerah guna pengembangan Madrasah Aliyah Model Insan Cendekia di daerah

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 1 Februari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Dr. H. DEDING ISHAK, SH., MM.